

Tesis Administrasi Publik

Shadow Play examines how members of the urban underclass in Indonesia seek to negotiate their rights to urban space in a country undergoing significant social, political, and economic change.

Function of adat council in solving land dispute cases of Walsa ethnic group in Papua, Indonesia.

Untuk memahami lebih mendalam mengenai Pelayanan Keluarga Berencana, buku ini sangat direkomendasikan untuk dibaca khususnya bagi dosen, mahasiswa/i, dan praktisi kesehatan baik dokter, bidan, maupun masyarakat awam, karena di dalamnya dikupas tuntas tentang seluk beluk Pelayanan Keluarga Berencana, yang kemudian terbagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut: Bab 1 Konsep Kependudukan di Indonesia Bab 2 Masalah Kependudukan di Indonesia Bab 3 Perkembangan KB di Indonesia Bab 4 Program KB di Indonesia Bab 5 Program KIE dalam Pelayanan KB Bab 6 Pelayanan Kontrasepsi dengan berbagai Metode Bab 7 Cara Pembinaan Akseptor Bab 8 Dokumentasi dan Pelaporan Pelayanan KB Bab 9 Layanan Kesehatan Reproduksi dan KB.

Perkembangan ilmu dan teknologi dewasa ini mempunyai arti penting dalam dunia pendidikan. Masyarakat semakin sadar akan kelanjutan menempuh pendidikan jenjang yang lebih tinggi, terutama bagi dosen, guru maupun pegawai. Jenjang pendidikan yang ditempuh adalah Strata Satu (S1) ke jenjang Strata Dua (S2), Strata Dua (S2) ke jenjang Strata Tiga (S3). Faktual dilapangan masih ditemukan mahasiswa semester akhir pada jenjang Strata dua (S2) dan Strata tiga (S3) yang merasakan kegalauan dalam penyusunan tesis dan disertasi. Buku Manajemen Penelitian Pengembangan (Research & Development) merupakan solusi bagi mahasiswa yang

sedang melakukan penelitian pengembangan (Research & Development). Buku ini secara garis besar berisi praperencanaan penelitian, perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, dan penyusunan laporan penelitian, serta publikasi penelitian. Buku ini juga memberikan panduan, prosedur serta contoh bagi mahasiswa yang sedang menyusun tesis dan disertai dari pengalaman penulis yang pernah lakukan.

This book constitutes the thoroughly refereed proceedings of the International Conference on Environmental Governance held in Makassar, Indonesia. The 67 full papers presented were carefully reviewed and selected from 212 submissions. The papers reflect the conference sessions as follows: ICT and Environmental Sustainability, Electronic Environmental Monitoring, E-Government for Environmental System, Environmental law and politics, Sustainable future for human security, Disaster risk reduction, Climate change and adaptive capacity, Islamic environmental thought, Socio-environmental conflicts, Global environmental change, Sustainable development goals (SDGs), Ocean policy and governance, Rural development and planning, Forest governance and conservation, Water and soil conservation, Business and CSR, and Urban vulnerability and resilience.

Ketertarikan penulis untuk menulis buku dengan judul Aneka Pendekatan dan Teori Dasar Administrasi Publik – Edisi Revisi ini berawal dari ranah administrasi publik sangat luas, kompleks, dan dinamis telah menimbulkan kesulitan amat besar untuk membangun teori tunggal sebagai satu-satunya teori yang mampu memberikan deskripsi dan eksplanasi yang komprehensif dan akurat terhadap berbagai permasalahan yang muncul. Kondisi ini akhirnya mendorong berkembangnya aneka ragam metodologi (pendekatan) dalam administrasi publik. setiap pendekatan dan teori, pada dasarnya merupakan hasil derivasi dari meta-teori yang melandasinya.

Teori baru timbul sebagai hasil derivasi dari landasan meta-teori yang berbeda dengan teori lama sehingga perubahan dari teori satu ke teori berikutnya, seperti ditegaskan Thomas Khun, tidak sekedar bersifat revolusioner kumulatif tetapi justru lebih bersifat revolusioner paradigmatik.

Buku ini dibagi dalam empat bagian, yaitu pengantar, dua bab, dan penutup. Dalam pengantar telah ditetapkan masalah atau problem yang perlu dipecahkan. Dalam Bab 1 dibahas hubungan antara teori dan praktek, yaitu di satu pihak hubungan antara administrasi pembangunan (praktek), dan di pihak lain ilmu Administrasi Pembangunan (teori). Kemudian dalam Bab 2 diterangkan metode penelitian ilmiah yang harus dipakai dalam ilmu-ilmu sosial untuk dapat menghasilkan jenis pengetahuan ilmiah spesifik yang diperlukan itu. Kemudian dalam penutup, akhirnya dinilai kembali hasil (result) yang diperoleh dari upaya memecahkan masalah yang bersangkutan. Sebagai petunjuk untuk pembaca buku ini, barangkali berguna untuk diketahui bahwa pembagian ke dalam empat bagian tersebut berdasar logika pendekatan proses pemecahan masalah yang disajikan. Indonesian politics and government.

Menurut pandangan humanisme, manusia memiliki kemampuan untuk mengarahkan dirinya pada tujuan yang positif dan rasional. Perkembangan kepribadian seseorang tidak lepas dari pengaruh lingkungan sosial budaya tempat tumbuh dan berkembangnya seseorang. Setiap orang pasti akan selalu berusaha agar segala kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi dengan baik sehingga dapat mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Sebagai warga negara, kita tidak boleh hanya berpangku tangan mendiamkan proses pemerintahan yang

mengarah pada terancamnya kerusakan peradaban lebih jauh yang menjadi ancaman bagi keberadaan negara-bangsa Indonesia. Di bidang politik, kita menghendaki tegaknya tanggung jawab lembaga-lembaga politik atas mandat yang telah diberikan rakyat kepadanya. Etika administrasi publik merupakan etika yang mengatur bagaimana sebaiknya pelayan-pelayan masyarakat bekerja. Etika ini menuntut para pekerja yang berhubungan langsung dengan masyarakat untuk mempertanggungjawabkan tingkah lakunya di kemudian hari. Masih banyak mental bekerja dengan tidak baik yang masih menempel pada pekerja-pekerja administrasi publik ini. Hal ini tidak terlepas dari budaya atau kebiasaan, pembentukan mental yang kurang terasah, dan faktor karakter seseorang. Buku etika administrasi publik ini menyajikan penjelasan-penjelasan mengenai pekerjaan administrasi publik. Dalam buku ini juga dijelaskan dasar-dasar hukum maupun undang-undang yang mengatur jalannya pekerjaan untuk pelayanan publik ini. Selain itu, buku ini juga menyajikan jenis pelanggaran-pelanggaran yang sering kali dilakukan oleh pelayan publik. Tidak hanya jenis pelanggaran, namun juga konsekuensi dari tindakan yang sudah merugikan masyarakat ini. Buku ini sangat sesuai untuk dibaca oleh mahasiswa yang mempelajari Ilmu Pemerintahan seperti Administrasi Negara dan lain-lain. Selain itu, buku ini juga sesuai dibaca oleh

para pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan yang makin meningkatkan kualitas dan mental para pelayan publik, mengingat pekerjaan ini akan banyak melibatkan masyarakat.

Kegagalan Indonesia memutus warisan kolonial dalam kehidupan birokrasi pemerintah telah ikut membentuk sosok birokrasi dan aparatur yang gagal mentransformasi dirinya sebagai agen pelayanan dan perubahan.

Buku pelayanan prima instansi pemerintah ini mencoba mengungkapkan secara kritis bagaimana kondisi sebenarnya pelayanan prima di instansi pemerintah di Indonesia. di pahami pelayanan prima merupakan terjemahan istilah “excellent service” yang secara harfiah artinya pelayanan terbaik atau pelayanan yang sangat memuaskan. Disebut sangat memuaskan atau terbaik karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki instansi pemberi pelayanan. Sejatinya hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Di Indonesia sebagaimana diketahui bahwa pelayanan publik khususnya di kantor-kantor pemerintah belum semua mencapai pelayanan prima sebagaimana yang diharapkan. Terutama instansi-instansi pelayanan publik di pelosok-pelosok Tanah Air. Karena itu juga keterbatasan yang ada sehingga pelayanan prima belum memuaskan. Kendati

demikian, banyak juga instansi-instansi pelayanan publik pemerintah di perkotaan telah mampu menerapkan pelayanan prima. Buku persembahkan penerbit PrenadaMediaGroup

Buku ini mengkaji beberapa aspek yang berhubungan dengan Reformasi Biokrasi Dalam Pelayanan Publik yang lebih banyak dikhususkan pelayanan one stop services system, yang diharapkan dapat memberikan implikasi positif dalam perizinan dan non perizinan. Serta sangat memberi manfaat dalam melengkapi literatur Biokrasi Publik, bagi mahasiswa program studi ilmu Ilmu Administrasi Publik maupun praktisi atau birokrat yang melaksanakan fungsi sebagai public services.

Sudah lama penulis ingin menyampaikan gagasan dan pemikiran tentang berbagai isu strategis dalam mendorong reformasi di sektor publik. Pengalaman melakukan kegiatan konsultasi di berbagai lembaga donor untuk membantu pemerintah dalam mendorong reformasi sektor publik memberi akses yang besar kepada penulis untuk melakukan riset terkait dengan pembagian urusan pemerintah, standar pelayanan minimal, dan reformasi aparatur sipil negara di daerah. Sebagian bab yang ada di dalam buku ini adalah policy paper yang ditulis untuk pemerintah dan lembaga donor untuk mendorong percepatan reformasi sektor publik terutama terkait dengan pembaruan desentralisasi dan praktik

governance di daerah. Publikasi buku ini diharapkan dapat memperluas gagasan dan pemikiran tentang reformasi sektor publik untuk memastikan desentralisasi membawa manfaat bagi masyarakat di daerah. Buku ini diharapkan mampu memberi inspirasi kepada semua pihak terutama para akademisi, mahasiswa, dan administrator publik tentang betapa banyaknya isu kebijakan, tantangan yang dihadapi, dan tindakan yang perlu dilakukan untuk mempercepat reformasi administrasi publik. Indonesia segera memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan kemampuan bangsa untuk menghadapi era tersebut sangat ditentukan oleh pembaruan sektor publik yang dilakukan. Jika reformasi sektor publik dapat dilakukan secara efektif, kita mungkin bisa lebih percaya diri untuk memanfaatkan MEA demi kesejahteraan rakyat. Salah satu perubahan yang sangat mendasar dalam revisi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah ketentuan pengaturan lembaga perbedaan pendapat yang sangat berlainan dengan ketentuan dalam perundangan sebelumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Ketentuan ini selanjutnya menyebutkan bahwa jika

dalam sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, maka pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Buku ini berasal dari hasil penelitian penulis dan beberapa tulisan yang telah dipublikasi di jurnal, kemudian dilengkapi dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain. Tujuan penulisan buku ini adalah membahas tentang perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dalam putusan, khususnya berkaitan dengan perkara perdata dan pidana di pengadilan negeri. Pembahasan dalam buku ini meliputi pengadilan negeri dalam sistem kekuasaan kehakiman, pemeriksaan perkara perdata, pemeriksaan perkara pidana, tinjauan umum tentang perbedaan pendapat dan praktik penerapan perbedaan pendapat dalam putusan perkara perdata dan pidana di pengadilan negeri. Oleh karena itu, buku ini akan sangat bermanfaat bagi para mahasiswa Fakultas Hukum pada program S-1 dan S-2, akademisi, para praktisi hukum, serta siapa saja yang ingin mengetahui dan mempelajari tentang perbedaan pendapat dalam putusan perkara perdata dan pidana di pengadilan negeri. Buku persembahkan penerbit

MediaPressindogroup

Setelah kurang lebih satu tahun buku ini diterbitkan, Alhamdulillah buku ini dicetak ulang. Penulis bersyukur bahwa gagasan yang disam paikan dalam buku ini memperoleh sambutan yang baik dari para maha siswa, pemerhati, dan pakar adrninistrasi

publik. Ketika buku ini dicetak ulang penulis mencoba memperkaya pembahasan berbagai isu yang ada di Bab I Mengembangkan Sistem Pelayanan Publik Dalam Negara Kesatuan Yang Desentralistik dan Bab V Manajemen Kolabatif: Kemitraan Antara Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah. Sedangkan Bab-Bab lainnya tidak mengalami perubahan. Revisi Bab I dilakukan untuk memperkaya analisis penulis tentang pembagian urusan pemerintahan terkait dengan peran pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pembagian urusan pemerintahan sampai sekarang masih menjadi pekerjaan rumah yang belum dapat diselesaikan oleh pemerintah dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Kerancuan pembagian urusan antara susunan pemerintahan menjadi salah satu sumber masalah dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang efisien, efektif, dan akuntabel. Perubahan dalam Bab ini dilakukan untuk memperjelas pendapat penulis mengenai bagaimana seharusnya pembagian urusan dalam penyelenggaraan pelayanan dilakukan antara pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota dilakukan. Perubahan juga dilakukan dalam diskusi tentang standar pelayanan mini mal (SPM). Dalam revisi ini penulis menambahkan penjelasan tentang berbagai sumber kegagalan implementasi SPM dan bagaimana seharusnya perbaikan substansi dan

strategi implementasi SPM dilakukan. Revisi Bab V dilakukan untuk menambah penjelasan tentang pengembangan manajemen kolaboratif, yang didalam edisi yang pertama masih sangat minimal. Dalam edisi kedua ini penulis menambahkan penjelasan tentang bagaimana pemerintah dan manajer sektor publik seharusnya memilih mitra kerjasama.

Tulisan ini bermaksud memberikan rangsangan ide kepada para pengambil keputusan agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu dalam menyusun kebijakan baru terhadap Papua. Menjelang berakhirnya pengucuran dana Otsus pada tahun 2021, dapat dijadikan momentum untuk memberikan Papua sebuah kebijakan baru yang berasal dari kehendak dan partisipasi masyarakat Papua dengan melihat capaian Otsus selama ini. Proses ini jangan dianggap sebagai pintu referendum bagi lepasnya Papua, melainkan pintu untuk menciptakan relasi yang lebih baik antara Pemerintah Pusat dan Provinsi Papua dan Papua Barat, serta dengan orang asli Papua. Penulis berharap apa yang menjadi cita-cita orang asli Papua untuk mendapatkan keadilan, penegakan hukum dan HAM, serta kesejahteraan dan kemajuan bagi masyarakat Papua, dapat segera tercapai.

Wacana Gender dan Kehutanan Masyarakat secara umum sudah dikenal di masing-masing disiplin ilmu induknya, yakni Ilmu Sosial dan Kehutanan. Bahkan

secara tersirat, program-program terkait hal tersebut telah menjadi program pembangunan di masing-masing sektor dengan dukungan wacana pembangunan global (MDGs). melalui buku ini, penulis mencoba mencari benang merah dua wacana tersebut yang notabene keduanya sama-sama sebagai wacana pinggiran di masing-masing sektor. Seperti disiratkan penulis, wacana gender selama ini hanya berkutat di masyarakat (urban maupun pedesaan) dan segala problematika, dari masalah ekonomi, KDRT, trafficking, hingga ke hal pribadi, yakni kesehatan reproduksi. Simak dalam buku ini, |Penerbit Deepublish, Deepublish, | Buku ini menjelaskan tentang karakteristik pelayanan publik yaitu prinsip dan komponen pelayanan, asas-asas pelayanan publik, strategi peningkatan pelayanan publik, usaha untuk meningkatkan semangat, tugas, fungsi, dan struktur organisasi pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil, SOP Alur pelayanan administratif pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

Berangkat dari pengalaman mengajar di kelas pada saat kuliah Metodologi Penelitian khususnya, selalu saja kekurangan waktu untuk menjelaskan materi kuliah yang bersangkutan, sementara disisi lain masih banyak materi yang harus disampaikan kepada mahasiswa, sehingga akhirnya dosen harus memilih apakah memilih materi yang disampaikan

sedikit tetapi mahasiswa memahami semua yang disampaikan, atau memilih menyampaikan semua materi, tetapi konsekuensinya mungkin banyak mahasiswa yang tidak faham. Untuk itu adanya Buku Ajar ini sedikit dapat membantu dosen dan mahasiswa untuk menemukan jalan tengah, artinya tidak semua materi harus disampaikan dikelas, bagian dari materi yang kira-kira bisa difahami oleh mahasiswa hanya dengan membaca sendiri, maka dapat hanya dengan membaca di Buku Ajar ini, dengan demikian semua materi yang sudah direncanakan oleh dosen di 14 kali pertemuan per semester tersebut dapat disampaikan semua dengan tuntas. Sebagai pengayaan tambahan maka di kelas, perlu dibuka “ruang” diskusi bagi mahasiswa yang belum faham setelah membaca Buku Ajar ini. Buku Ajar ini coba penulis tuliskan dengan menggunakan Bahasa “kampung” tujuannya adalah agar apa yang ditulis dalam buku ini mudah difahami oleh siapa saja. Disamping itu berbagai materi yang ditulis dalam Buku Ajar ini adalah kombinasi teori dan praktik, sehingga isi buku ini lebih mengarah kepada pragmatis, khususnya dalam konteks penelitian akademik (Skripsi, Tesis dan Disertasi). Akhir kata, karena keterbatasan pengetahuan dan wawasan serta pengalaman penulis, khususnya dalam bidang ilmu Metodologi Penelitian, maka buku ini tentu masih jauh dari sempurna seperti kata pepatah tiada gading yang

tak retak, untuk itu segala kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca sangatlah penulis diharapkan guna penyempurnaan buku ini dimasa yang akan datang. Pontianak, Desember 2019

Penulis

The 1st International Conference on Tourism, Management and Technology is motivated by improving the quality of research and development relating to tourism, management and technology fields. Thus, this conference has aims: (1) to bring together the scientists, researchers and practitioners, and lecturers. (2) To share and to discuss theoretical and practical knowledge about innovation in tourism, management and technology fields. The conference took place in Universiti Kuala Lumpur, Malaysia, on August, 17th 2019. There are 34 papers that are participated from various topics. The conference involves tourism, management and technology fields, such as; Media and Technology in Tourism, Innovation in Tourism, The Theoretical Perspective on Tourism, Sustainable Tourism, Gender and Diversity Issue in Tourism, Technology and Management on Tourism, Law in Tourism, Health Tourism, Tourism Policy and Planning, Tourism and Environment, Finance in Tourism. Specifically, this conference can be used as a scientific forum for accommodating discussion among young researchers that originated from Indonesia in the field of Tourism, Management and

Technology. Therefore, the invited speakers in this conference are the researchers that are well-known and reputable in the world. We would like to thank the organizing committee and the members of reviewers for their kind assistance in reviewing the papers. We would also extend our best gratitude to keynote speakers for their invaluable contribution and worthwhile ideas shared in the conference. Furthermore, ICTMT is hoped to be able to be used as academic media to exchange ideas and as a result it will succeed in deciding the recommendation related to the tourism, management and technology phenomenon.

Buku Esai Keuangan Negara: Sumbangsih Pemikiran untuk Negeri ini dikupas dalam empat tema besar mengenai pengelolaan keuangan negara, yaitu dari sisi perpajakan dan kepabeanan dan cukai, keuangan publik, serta akuntansi pemerintah. Buku ini adalah kristalisasi pemikiran dan sumbang saran para dosen di Politeknik Keuangan Negara STAN berdasarkan pengalaman mereka pada posisi struktural di bidangnya masing-masing. Pengelolaan keuangan negara terus menghadapi tantangan seiring dengan perkembangan perekonomian global dan permasalahan struktural domestik yang memengaruhi daya saing. Dari sisi penerimaan negara khususnya perpajakan serta kepabeanan dan cukai, pemerintah menghadapi tantangan belum

optimalnya penerimaan negara untuk menutup kebutuhan belanja. Analisis kebijakan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran. Kajian terhadap kondisi yang nyata terjadi di lapangan diharapkan dapat menjadi referensi untuk perbaikan secara terus menerus yang perlu kita lakukan. Besarnya kebutuhan pembangunan sementara fluktuasi kondisi ekonomi serta masalah struktural yang memengaruhi penerimaan negara membuat pemerintah harus mencari sumber pembiayaan. Selain masalah pembiayaan, tema keuangan publik dalam buku ini juga menyoroti mengenai penyertaan modal negara dan dana alokasi umum. Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam pengelolaan keuangan negara. Maka buku ini ditutup dengan artikel-artikel mengenai analisis kebijakan dan kajian terhadap praktik dalam akuntansi pemerintahan. Buku ini akan bermanfaat dan menjadi referensi bagi berbagai kalangan. Melalui buku ini diharapkan para pendidik, mahasiswa, maupun masyarakat umum semakin memahami dinamika dan tantangan dalam pengelolaan keuangan negara serta alternatif penanganannya

trategi, Kepemimpinan dan Motivasi Kerja : Teori dan Aplikasi PENULIS: Hakimi, S.STP, M.Si. ISBN : 978-623-7503-18-7 www.guepedia.com Sinopsis: Berhasil tidaknya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan publik

sangat tergantung pada kualitas dan kuantitas sumber daya manusianya. Manajemen yang sering diartikan oleh para ahli sebagai proses mendayagunakan orang lain untuk mencapai suatu tujuan, hanya akan berlangsung efektif dan efisien jika para pimpinan organisasi mampu memotivasi para bawahan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Organisasi pemerintahan perlu didukung oleh seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan dengan menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang profesional, adil, mempunyai strategi yang mampu menggerakkan dan memotivasi bawahan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kecamatan adalah perangkat daerah yang langsung berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat, harus didukung dengan aparatur yang mempunyai semangat dan motivasi kerja yang tinggi. Sehingga peran pimpinan di kecamatan harus mampu mengarahkan dan memotivasi aparatur penyelenggara pemerintahan. Dalam buku ini dikupas strategi kepemimpinan dan motivasi kerja meliputi teori dan aplikasi pimpinan pada level kecamatan untuk memotivasi bawahannya sehingga pelayanan publik dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Buku ini hadir dan mencoba membahas berbagai permasalahan yang ada dan mencari akar penyebabnya berkaitan dengan strategi kepemimpinan dan motivasi kerja aparatur

penyelenggara pemerintahan melalui kajian teori dan aplikasi di lapangan. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

Tulisan-tulisan yang kemudian dikompilasi ini sudah menjadi sejarah bagi dirinya sendiri. Meski begitu, saya yakin, ada satu 'skenario utama' di balik berbagai percikan pemikiran yang muncul ke berbagai 'banyak wajah' itu..... Saya kira ini discourse yang sangat penting dalam dunia pergerakan. Banyak diucapkan, tapi belum dielaborasi secara tuntas. Di samping banyak 'dimusuhi' oleh kalangan akademik. R. Yando Zakaria (Aktivis Senior NGO)

Buku ini diinspirasi oleh buku lama karya Almarhum Prajudi Atmosudirdjo sebagai Begawan ilmu Administrasi di Indonesia berjudul "Pengantar Ilmu Administrasi" yang telah lama menjadi buku ajar untuk mahasiswa tingkat sarjana yang hingga kini terasa perlu dibuat up to date dengan perkembangan kekinian. Inspirasi juga datang dengan berdirinya Fakultas Ilmu Administrasi di Universitas Indonesia sebagai tempat berkarya bagi penulis dan sebagai penerus Prajudi Atmosudirdjo di bidang administrasi. Kebutuhan akan buku pegangan bagi mahasiswa apakah sarjana, magister atau doktoral untuk memahami konsep administrasi dengan mudah, yang melingkupi pula kedua administrasi baik publik maupun bisnis, juga kian

terasa. Jalan Sederhana Memahami Administrasi Publik Dan Bisnis: Antara Teori Dan Praktik ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak

Buku ini menjelaskan tahapan-tahapan terjadinya reformasi birokrasi di Nusantara (Indonesia). Berbagai strategi dan upaya telah mulai diterapkan di berbagai daerah, terutama di kabupaten/kota yang memiliki tingkat sumber daya manusia yang memadai. Buku ini menjadi penting untuk dibaca karena tidak hanya berisi dinamika-dinamika reformasi birokrasi di beberapa daerah di Nusantara, akan tetapi pula memberikan informasi penting mengenai makna dan tujuan dari pelaksanaan reformasi birokrasi itu sendiri. Sajian dalam buku ini sarat dengan informasi reformasi dan birokrasi yang terjadi selama 6 (enam) era kepemimpinan di Nusantara. Masing-masing kepemimpinan mempunyai nilai historis tersendiri dengan beberapa keunggulan yang ada dalam mengelola sistem pemerintahan selama menjabat sebagai kepala negara. Fenomena yang ada dapat pembaca tangkap dari setiap uraian yang terkandung di dalam pembahasannya. Buku ini menarik untuk dikaji dan dijadikan bahan diskusi untuk mengoptimalkan kinerja birokrasi di Nusantara.

Buku ini menekankan pada upaya pengkajian terhadap sejarah lengkap asal-usul dan perkembangan studi dan praktik kebijakan publik. Penekanannya lebih kepada keterampilan berpikir, khususnya bagi mahasiswa. Di samping itu, melalui buku ini juga dibahas tipe-tipe analisis dalam kebijakan publik dan proses pembuatan kebijakan publik. Di sisi lain, buku ini juga dilengkapi

dengan beberapa pendekatan dan sejumlah metode analisis yang digunakan dalam mengkaji kebijakan publik. Selain hal tersebut, juga diuraikan tentang landasan dan latar belakang filosofis, sosiologis, dan politis di balik perkembangan kebijakan publik di berbagai kawasan.

Perguruan Tinggi memiliki peran yang penting didalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Agar mampu menjalankan perannya dengan baik, perguruan tinggi dituntut untuk mampu mengimplementasikan manajemen sumber daya manusia yang baik terutama di dalam meningkatkan kinerja karyawan dan dosennya. Organisasi pendidikan tinggi adalah organisasi yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk dapat memainkan peran itu dengan baik setiap anggota organisasi yang terdiri dari dosen, pejabat dan mahasiswa harus berpartisipasi secara maksimal selain itu juga agar mampu menjalankan perannya dengan baik, perguruan tinggi dituntut untuk mampu mengimplementasikan manajemen sumber daya manusia yang baik terutama di dalam meningkatkan kinerja karyawan dan dosennya

"DR.Ir.H.Fadel Muhammad berhasil membumikan teori-teori penyelenggaraan pemerintahan yang rumit ke dalam praktik dengan logika dan tindakan yang mudah dipahami. Provinsi Gorontalo adalah laboratorium tempat dirinya melakukan eksperimen untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah yang unggul. Ia mencermati variabel-variabel yang diduga memengaruhi kinerja, antara lain karakteristik daerah, budaya organisasi, dan kapasitas

manajemennya. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) esis dan semakin kuat jika pemerintah daerah inovatif, kreatif, produktif, dan saling memanfaatkan keunggulan lokal dengan jejaring yang sehat antardaerah. NKRI tidak mungkin dibangun dari Jakarta.

-Dr.H.Jusuf S.K, Wali kota Tarakan/Ketua APEKSI"

Gender equality for women in legal instruments as implementation of Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women in Indonesian legal system.

Buku ini hadir memberi cara pandang yang secara jelas ingin mengatakan pada khalayak bahwa pengelolaan hutan perlu perubahan mendasar. Dan, perubahan tersebut dapat dilakukan dengan memercayai rakyat

mengelola hutan —Budiman Sudjatmiko, M.Sc; M. Phil, Anggota DPR RI Membaca karya ini akan bisa

memprovokasi pembaca untuk memikirkan dan mengusahakan bagaimana situasi “Hutan Kaya, Rakyat Melarat”, seperti yang ditulis oleh Peluso, bakal bisa

menuju “Hutan Subur, Rakyat Makmur” —Noer Fauzi Rachman, Ph.D, Peneliti Politik Agraria dan Gerakan-gerakan Rakyat Pedesaan Buku ini menjadi salah satu

referensi penting bagaimana disiplin Administrasi Publik membedah persoalan hubungan hutan-rakyat tersebut.

—Prof. Dr. Hariadi Kartodihardjo; Pengajar pada Fakultas Kehutanan IPB dan Program Pascasarjana IPB dan UI, Anggota WG Tenure dan Presidium Dewan Kehutanan Nasional Ini adalah kesaksian Barid betapa hutan bagi

masyarakat tani adalah hidup itu sendiri. Hutan tidak hanya soal sumber penghidupan, juga menjadi akar dan sumber budaya, relasi manusia dan alam yang

bersinergi dan berdinamika dalam nalar sejarahnya sendiri—Ahmad Ya'kub, Aktivis di Sekretariat Bina Desa Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila orang mengatakan, bahwa hukum tidak bisa lagi disebut hukum, manakala ia tidak diperlakukan (lagi). Perkataan dari Satjipto Rahardjo itu adalah pelaksanaan dari hukum secara ideal, dan masih berlaku sampai sekarang. Pada saat sekarang ini dimana perkembangan yang terjadi dalam masyarakat sangat cepat sebagai akibat dari pembangunan pada segala lini kehidupan termasuk dalam hukum, terkadang membawa dampak yang tidak selamanya positif terhadap perkembangan pembangunan tersebut. Hal ini bisa kita lihat dengan meningkatnya angka kejahatan dan kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Efektifitas pelaksanaan dan penegakan hukum yang terjadi dalam masyarakat di nilai pada saat ini sangat kurang pada dasarnya di sebabkan dari proses perkembangan masyarakat baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Hal ini terjadi karena tidak di imbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. #deepublish #Laurensius #Arliman #Penegakan #Hukum dan #Kesadaran #Masyarakat #Sekolah #Tinggi #Ilmu #Hukum #Padang #STIH

The International Conference on Fundamental Rights (I-COFFEES) is an international conference organized by the Faculty of Law, Universitas Lampung, to be an international scientific forum for researchers, academics, and practitioners. The first I-COFFEES were held in 2018 at the Novotel Hotel, Bandar Lampung, Indonesia.

In 2019, the Second I-COFFEES were held on 5-6 August at the Faculty of Law, Universitas Lampung, Indonesia. "Fundamental Rights" has been chosen for the main theme of the Second I-COFFEES with a focus field on Law and Development, Women and Children, Ethnic and Religion, Law and Public Policy, Local Government, Business Law and Disruption, Pengayoman Law, Village Development and Communal Rights, and International and Human Rights. The conference was attended by national and international delegates from university academics, researchers, and practitioners. In total, there are 71 papers presented, with only 28 papers published.

Buku pedoman ini sudah cukup lengkap, dengan memuat tentang sejarah perkembangan FISIP UNDIP, nama-nama pimpinan fakultas, visi-misi fakultan dan program studi, struktur organisasi fakultas, mekanisme pendaftaran mata kuliah, kurikulum masing-masing program studi, jumlah program studi, daftar nama dosen dan karyawan dan lain-lain.

Shadow Play
Information Politics in Urban
Indonesia
University of Toronto Press

Menjadi istri seorang bhayangkara yang sering berpindah-pindah tempat malah semakin menjadikanku kreatif untuk terus berkarya yang dapat mengisi waktu luang sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga. Dengan semangat dan tekad yang kuat dibarengi dengan ikhtiar dan doa, aku berusaha melakukan yang terbaik, dari menjadi

marketing pembiayaan sekaligus pembelian dan penjualan mobil serta yang lainnya sampai akhirnya memutuskan untuk menjadi ASN. Peran orangtuaku sangatlah besar dalam menjadikanku seperti saat ini di samping dukungan suami dan anak-anak serta keluargaku. Pada kesempatan ini kupersembahkan semangat hidupku dan keyakinan Allah akan bersama kita jika kita selalu bersama Allah Swt., hidup ini akan baik jika kewajiban kita pada Allah kita perbaiki Wallahu a'lam... semoga Allah Swt., senantiasa meridai perjalanan hidupku ini Aaammiiin Ya Rabbal Alamin. Buku persembahan penerbit IndieBookcorner

Buku ini secara rinci akan menguraikan pembahasan sebagai berikut: Seputar Wawasan Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik Kerangka Teoritik Perihal Partisipasi dan Kebijakan Publik Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan APBD APBD Partisipatif Antara Harapan dan Kegagalan Buku ini secara rinci akan menguraikan pembahasan sebagai berikut: Seputar Wawasan Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik Kerangka Teoritik Perihal Partisipasi dan Kebijakan Publik Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan APBD APBD Partisipatif Antara Harapan dan Kegagalan

Dinamika kehidupan Masyarakat Indonesia dewasa ini terlihat mendapatkan perubahan, baik secara psikologis, maupun nonpsikologis. Masyarakat

Indonesia yang dulu terkenal akan kesantunannya, lambat laun telah terjadi pergeseran dinamika perilaku kehidupan masyarakatnya menjadi lebih agresif dan sulit terkendali. Penyebabnya menurut penulis adalah berbagai faktor kebutuhan yang menuntut masyarakat untuk segera terpenuhi, tapi masih jauh dari kemungkinan untuk dipenuhi. Misalkan seperti pemenuhan fasilitas dan sarana pendidikan yang masih jauh dari harapan. Dari berbagai wacana dan pendapat yang muncul kemudian dapat kita rasakan dan lihat bahwa masyarakat Indonesia telah jenuh terhadap perlakuan yang diberikan oleh para penyelenggara negara, yang penulis perhatikan lebih mengedepankan aspek politik terhadap penyelesaian kebutuhan seluruh Masyarakat Indonesia. Pemandangan tersebut merupakan sebuah dinamika nyata, yang mempertemukan antara kebutuhan sosial masyarakat dengan kepentingan politik para penyelenggara negara. Erat kaitannya dengan hal tersebut, maka disini penulis dalam buku ini memaparkan cara pandang masyarakat dan para tokoh akademis dalam melihat dan menilai tingkat pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

[Copyright: 5087c4637b2034a17d4aaa7ac28645e7](https://doi.org/10.50807/5087c4637b2034a17d4aaa7ac28645e7)